



## **Diplomasi Yayasan Sukma dalam Negosiasi Pembebasan Sandera Warga Negara Indonesia di Filipina Selatan**

Joshua

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; rachmanjoshua@gmail.com

Hasan Sidik

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia; hasan.sidik@unpad.ac.id

| submit: 26-08-2020

| accept: 25-01-2021

| publish: 31-01-2021

### **Keywords**

*Sukma Foundation, Multi-track diplomacy, Hostage-Release Negotiation, Abu Sayyaf Group*

### **ABSTRACT**

*This research explains the activity of Sukma Foundation in the South Philippines in order to release 10 Indonesian hostages. The concepts used by the researcher to explain this phenomenon are multi-track diplomacy, conflict escalation, and hostage-release negotiation. Using qualitative-descriptive approach through interviews, literature studies, and internet-based research, researcher find that multi-track diplomacy, which involving humanity and cultural approaches, was the main factor of the 10 Indonesian hostages-release negotiation. This research also describes the escalation happened during the hostage-release process.*

### **Kata Kunci**

Diplomasi multi-track, Kelompok Abu Sayyaf, Negosiasi Pembebasan Sandera, Yayasan Sukma

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menjelaskan aktivitas yang dilakukan Yayasan Sukma hingga ke sepuluh sandera WNI di Filipina Selatan dapat dibebaskan. Untuk menjelaskan aktivitas Yayasan Sukma dalam pembebasan 10 sandera WNI di Filipina Selatan, penelitian menggunakan konsep *multi-track diplomacy*, eskalasi konflik, serta negosiasi pembebasan sandera. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi pustaka, serta penelitian berbasis daring. Penelitian ini menemukan bahwa *multi-track diplomacy* yang melibatkan pendekatan kemanusiaan dan kebudayaan menjadi kunci keberhasilan terbebasnya 10 WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf. Penelitian ini juga mendeskripsikan proses eskalasi yang terjadi selama upaya pembebasan sandera berlangsung.

## PENDAHULUAN

Pada tanggal 26 Maret 2016, kasus penyanderaan menimpa 10 Warga Negara Indonesia (WNI). Peristiwa bermula saat kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang berbendera Indonesia dibajak oleh Kelompok Abu Sayyaf saat sedang berlayar di Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan. Sebanyak 10 WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kedua kapal pun kemudian disandera oleh kelompok gerakan separatis Abu Sayyaf. Untuk membebaskan kesepuluh WNI tersebut, Kelompok Abu Sayyaf menuntut 50 juta Peso atau sekitar 15 milyar Rupiah sebagai uang tebusan dengan tenggat waktu hingga 8 April 2016.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila kemudian terus melakukan upaya pembebasan sandera. Meski Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku siap menjalankan operasi khusus guna membebaskan sandera, pada akhirnya pendekatan kemanusiaan lebih diutamakan. Salah satu alasan mengenai dipilihnya pendekatan kemanusiaan adalah adanya kemiripan latar belakang agama dan budaya masyarakat Filipina Selatan dengan Indonesia. Setelah menempuh berbagai upaya, pada tanggal 12 Mei 2016 Indonesia berhasil 10 ABK Warga Negara Indonesia berhasil dibebaskan.

Peristiwa tersebut mendapatkan perhatian setelah 10 ABK WNI dibebaskan tanpa ada kontak senjata juga klaim dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bahwa pembebasan dilakukan tanpa uang tebusan.<sup>2</sup> Sebab penyanderaan, yang dapat dipandang

sebagai konflik, seringkali ditanggapi dengan penggunaan kekerasan. Konflik sendiri didefinisikan oleh Zartmann dapat terjadi ketika terdapat dua atau lebih pihak memiliki perbedaan pandangan dan berusaha memaksakan kehendak mereka.<sup>3</sup> Namun, dalam upayanya menyelesaikan konflik dengan Kelompok Abu Sayyaf, Indonesia tidak menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan pendekatan kemanusiaan.

Dalam perkembangannya, konflik cenderung berujung pada kekerasan. Berkaitan dengan penelitian ini, konflik yang mana adalah penyanderaan, dilakukan oleh kelompok teroris. Dalam arti luas, terorisme merujuk pada upaya untuk mencapai sebuah tujuan politik dengan menggunakan kekerasan untuk memunculkan rasa takut, khawatir, dan ketidakpastian.<sup>4</sup> Dengan premis tersebut, maka terorisme dapat diartikan sebagai sebuah taktik perang. Mengingat terorisme berupaya mencapai sebuah tujuan politik dengan menggunakan kekerasan, maka tindak terorisme merupakan sebuah konflik kekerasan.<sup>5</sup>

Sedangkan, *peacemaking* yang dalam penelitian ini adalah pembebasan sandera seperti diungkapkan oleh Louise Diamond dan John McDonald melalui buku *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace*, adalah serangkaian tindakan yang tidak hanya berupaya untuk mewujudkan perdamaian diantara pihak yang sedang berlawanan, melainkan juga untuk mencegah, untuk mengelola dan meresolusi konflik, untuk rekonsiliasi, untuk mengeksplorasi isu terkait perdamaian umum maupun kasus konflik khusus, untuk mendidik dan meneliti isu perdamaian dan konflik khusus, untuk membangun teori dan praktek langsung, untuk mempengaruhi kebijakan, untuk menyediakan

<sup>1</sup> BBC. Dua kapal Indonesia dibajak di Filipina, 10 WNI disandera. Melalui <[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160329\\_indonesia\\_kapal\\_dibajak\\_filipina](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_kapal_dibajak_filipina)>[03/9/19]

<sup>2</sup> Wangke, Humphrey. 2016. "Keberhasilan Diplomasi Total". Majalah Info Singkat Hubungan Internasional (May). Melalui [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-VIII-10-II-P3DI-Mei-2016-4.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-10-II-P3DI-Mei-2016-4.pdf) [03/9/19]

<sup>3</sup> Zartmann, I. & Faure, G. 2005. *Escalation and Negotiation in International Conflicts*. New York: Cambridge University Press, 4.

<sup>4</sup> Heywood, A. 2011. *Global Politics*. London: Palgrave Macmillan. 284.

<sup>5</sup> Goodin, R. 2006. *What's Wrong with Terrorism*. Cambridge: Polity. 5.

informasi, untuk memfasilitasi dialog, untuk menyelenggarakan negosiasi dan mediasi, yang mana semua tindakan tersebut didasari dan ditujukan untuk membangun hubungan yang lebih baik, baik antara Negara dengan Negara maupun dengan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam rangka membebaskan sandera, negosiator memerlukan motif dan latar belakang dari pihak yang akan diajak bernegosiasi.

Kelompok Abu Sayyaf sendiri adalah sebuah kelompok jihadis militan dan perompak yang beroperasi di wilayah Filipina Selatan. Sebagai upayanya untuk membebaskan WNI dari penyanderaan Abu Sayyaf, Indonesia kemudian melibatkan beberapa aktor seperti Yayasan Sukma. Diplomasi yang dilakukan oleh Yayasan Sukma dalam membebaskan sandera, sebagai turunan dari *multi-track diplomacy*, adalah sebuah bentuk *modern diplomacy* dimana terdapat beberapa aktor yang terlibat.

Dalam upayanya membebaskan sandera, Yayasan Sukma menggunakan pendekatan agama dan budaya. Pendekatan kemanusiaan dengan unsur budaya dan agama oleh Yayasan Sukma tersebut kemudian berhasil membebaskan 10 WNI yang menjadi korban tindak terorisme kelompok Abu Sayyaf. Dengan keberhasilan tersebut, pendekatan budaya dan agama oleh Yayasan Sukma berpotensi menjadi percontohan bagi negara lain sebagai solusi. Selain konsep *multi-track diplomacy*, penelitian juga menggunakan konsep pembebasan sandera melalui negosiasi oleh I. William Zartmann dan Guy Olivier Faure.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### *Multi-track Diplomacy*

Cikal bakal *multi-track diplomacy* berawal dari tahun 1981, melalui artikel yang ditulis oleh Joseph Montville mengenai konsep diplomasi track satu dan track dua.

<sup>6</sup> Diamond, L & McDonald, J. 1996. *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. Colorado: Kumarian Press. 13.

**Tabel 1. Diplomasi Track Satu dan Dua**

	<b>Track satu</b>	<b>Track dua</b>
Aktor	Perwakilan resmi Negara, pemerintah, organisasi multinasional, pemimpin Negara dan pemimpin organisasi multinasional	Perwakilan tidak resmi, organisasi non-pemerintah (NGO), pemimpin lokal, kelompok akar rumput
Metode	Insentif positif dan negatif, mediasi, dukungan ekonomi, dukungan politik	Diskusi dua arah, <i>workshop</i> , rekonsiliasi akar rumput
Fokus	Peacemaking dan Peacekeeping	Peacemaking dan Peacebuilding

Sumber: Dewi, P. R., 2019: 193

Pada tabel 1 di atas, upaya diplomasi yang dilakukan oleh track dua penting dilakukan guna melancarkan jalan bagi diplomasi yang dilakukan oleh kategori satu. Hal ini dikarenakan track dua melakukan diplomasinya dengan terjun langsung ke arena konflik dan oleh karenanya informasi lebih mudah dikumpulkan.

Selanjutnya Louise Diamond dan John W. McDonald pada tahun 1989, Louise Diamond dan John McDonald melalui buku *Multi-track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*, melahirkan perkembangan terakhir dari *multi-track diplomacy* sebagai pendekatan sistemik dalam *peacemaking* dan resolusi konflik yang dikenal saat ini. Terdapat sembilan track dalam *multi-track diplomacy*.<sup>7</sup> Berbeda dengan diplomasi tradisional yang lebih fokus pada penyelesaian konflik dan kekerasan, *multi-track diplomacy* fokus pada pencegahan konflik, seperti kemiskinan, atau pembangunan ulang perspektif.<sup>8</sup> Dalam konteksnya dengan fenomena penyanderaan oleh Kelompok Abu Sayyaf, *multi-track diplomacy* sejatinya berpotensi untuk mengurangi kemiskinan, membangun ulang perspektif yang ada pada para anggota Kelompok Abu Sayyaf, hingga mencegah

<sup>7</sup>Institute for Multi-Track Diplomacy. 2006. Annual Report 2006. Arlington: 2.

<sup>8</sup> McDonald, J. 2012. The Institute for Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology* 3: 67.

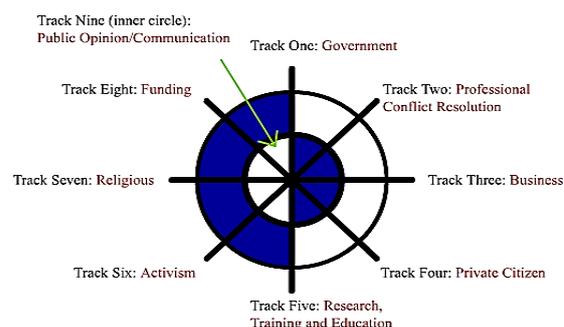
konflik yang ada di wilayah Filipina Selatan pada masa mendatang. Meski aktor non-pemerintah terus bertambah dalam hubungan internasional, namun pemerintah tetap memegang peranan terpenting dalam *multi-track diplomacy*. Melalui track satu ini, diplomasi resmi, *policymaking*, dan *peacebuilding* melalui aspek formal dilaksanakan. Pemerintah merupakan aktor dalam track satu. Selanjutnya, pada track dua adalah *peacemaking through conflict resolution*. Aktor dalam track dua ini adalah tenaga profesional di bidang resolusi konflik.

Pada track tiga adalah *peacemaking through commerce*. Melalui jalur ini manajemen konflik dapat terpengaruhi melalui aktivitas bisnis. Aktor dalam track tiga adalah pelaku bisnis. Berikutnya track empat adalah *peacemaking through personal involvement*. Aktor dalam track empat adalah warga negara sipil. Selanjutnya track lima adalah *peacemaking through learning*. Aktor dalam track lima adalah akademisi seperti penelitian, *trainer*, dan *educator*. Selanjutnya, track enam adalah *peacemaking through advocacy*.<sup>9</sup> Aktor dalam track ini adalah aktivis. Dalam track ini terdapat aktivisme di bidang perdamaian dan lingkungan.

Berikutnya, track tujuh, adalah *peacemaking through faith in action*.<sup>10</sup> Aktor dalam track tujuh adalah pemuka agama dan penganutnya. Selanjutnya adalah *peacemaking through providing resources* dalam track delapan. Track ini merujuk kepada pemberian bantuan finansial untuk berbagai aktivitas yang dilakukan track lain. Aktor dalam track delapan adalah komunitas pendanaan serta filantropis.

Track terakhir, track sembilan, adalah *peacemaking through information*. Track terakhir ini berfungsi untuk membentuk opini publik. Aktor dalam track sembilan adalah orang-orang yang bekerja di area opini publik dan komunikasi.

**Gambar 1. Multi-track Diplomacy**



Sumber: John W. McDonald, 2003: 1

### Sifat dan Penyebab, Eskalasi, De-eskalasi dan Negosiasi dalam Konflik Internasional

Guna membebaskan sandera, negosiasi dipandang sebagai salah satu upaya paling efektif. Dalam upayanya membebaskan sandera, negosiator harus mengelola dua kendala yang saling bertentangan, yakni memastikan pembebasan sandera dan memberikan efek jera kepada teroris lainnya agar penyanderaan tidak terulang.<sup>11</sup> Mengingat negosiasi adalah akhir dari sebuah eskalasi konflik, maka penting untuk memahami eskalasi itu sendiri. Eskalasi dapat dipahami sebagai mekanisme koersif mutual yang lekat pada perspektif konflik.<sup>12</sup>

Namun eskalasi bukan hanya intensifikasi dari konflik di mana perubahan hanya terjadi pada tingkatan konflik, melainkan bentuk perubahan *nature* dari konflik itu sendiri. Oleh karenanya eskalasi dapat memengaruhi bahkan mengubah dimensi-dimensi dari konflik itu sendiri. Terdapat beberapa jenis eskalasi konflik, sebagai berikut:

1. *Escalation of means*
2. *Escalation of ends*
3. *Escalation of space*
4. *Escalation of price*
5. *Escalation of parties*
6. *Escalation of images*
7. *Escalation of risk*

<sup>11</sup> Wilson, M. 2000. Toward a Model of Terrorist Behavior in Hostage-Taking Incidents. *The Journal of Conflict Resolution* 44: 406

<sup>12</sup> Zartmann, I. & Faure, G. 2005. *Escalation and Negotiation in International Conflicts*. New York: Cambridge University Press, 4.

<sup>9</sup> Diamond, L & McDonald, J. Op. Cit. 87.

<sup>10</sup> Idem., 97.

8. *Escalation of costs*

9. *Escalation of commitment*<sup>13</sup>

Dengan adanya eskalasi dalam sebuah konflik, maka akan meningkatkan “pertaruhan” yang ada. Jenis eskalasi yang terjadi dalam konflik akan menentukan jenis solusi dan taktik yang akan diterapkan. Penyebab eskalasi konflik sendiri selain disebabkan oleh pihak yang terlibat, juga disebabkan oleh konflik itu sendiri. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki beberapa tujuan dari eskalasi konflik, yaitu:

1. Memenangkan konflik;
2. Menghindari kekalahan, baik dengan mempertahankan konflik maupun mempercepat negosiasi;
3. Menutupi biaya hangus akibat konflik;
4. Mendapatkan dukungan, baik dari dalam maupun dari luar;
5. Merebut kesempatan;
6. Sebagai bentuk penghargaan diri sendiri, “*I deserve it*”;
7. Untuk menghukum pihak lain, “*they deserve it*”.<sup>14</sup>

Selain berujung pada bertambah buruknya konflik, eskalasi dalam konflik juga dapat berujung kepada negosiasi. Situasi yang memungkinkan terjadinya negosiasi tersebut dapat diinisiasi oleh aktor yang terlibat maupun oleh pihak ketiga.<sup>15</sup> Layaknya eskalasi, negosiasi juga memiliki struktur langkah yang responsif. Negosiasi merupakan sebuah pertukaran penawaran dari sudut pandang yang berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama, di mana dalam prosesnya diatur oleh proses resiprokal yang menyeluruh.<sup>16</sup>

Terdapat berbagai macam variabel yang dapat mempengaruhi eskalasi. Variabel-variabel tersebut muncul pada beberapa mekanisme berikut:

1. *Fear and fatigue*

<sup>13</sup>Idem., 8.

<sup>14</sup>Idem., 9.

<sup>15</sup>Idem., 5.

<sup>16</sup>Idem., 11.

2. *Mutually hurting stalemates*

3. *Changes in stakes*

4. *Changes in parties*

5. *Changes in attitudes*

6. *Disengagement and breathing space*

7. *Confidence and security-building measures (CSBMs)*

8. *Learning processes*

9. *Reaffirmed relationship*

10. *Mutually enticing opportunity (MEO)*

11. *Cultural values*.<sup>17</sup>

Mekanisme-mekanisme di atas dapat menggiring situasi konflik dari eskalasi menuju negosiasi. Setelah terdapat mekanisme yang menciptakan situasi negosiasi, rute komunikasi pun terbuka dan negosiasi dapat dimulai.

### **Negosiasi Pembebasan Sandera**

Penyanderaan seringkali ditujukan untuk menciptakan situasi kekuasaan. Menjadi hal yang wajar apabila penyanderaan menjadi semacam senjata bagi yang lemah untuk menyerang dan mendiskreditkan negara dan pemerintah sebagai pihak otoritas yang berwenang. Dalam rangka membebaskan sandera, diperlukan pemahaman akan motif dan tujuan dari teroris yang melakukan penyanderaan. Terorisme dapat dibedakan menjadi 3 kategori, kelompok terorisme politik, kelompok terorisme religius, dan kelompok terorisme ekonomi.<sup>18</sup>

Margaret Wilson menyatakan bahwa bentuk penyanderaan *kidnapping* merupakan bentuk penyanderaan yang paling sulit diintervensi oleh pihak berwenang.<sup>19</sup> Hal ini disebabkan sifat *kidnapping* yang *mobile* di mana sandera dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk mengatasi persoalan *kidnapping*, terdapat beberapa prosedur yang tersedia untuk membebaskan

<sup>17</sup>Idem., 12-13.

<sup>18</sup>Faure, G. 2011. *Negotiating with Political, Ideological, and Criminal Terrorist. Jornadas secuestros y toma de rehenes por parte de grupos terroristas prevención y respuestas* : 4.

<sup>19</sup>Ibid.

sandera. *Federal Bureau Investigation* (FBI), mendasari pembebasan sandera dengan keterampilan *active-listening*.<sup>20</sup> Dengan keterampilan *active-listening*, empati negosiator dapat ditunjukkan kepada penyandera. Dasar dari keterampilan *active-listening* adalah *basic listening sequence* (BLS). BLS terdiri dari pertanyaan bersifat *open-ended*, *encouragers*, dan refleksi, yang kemudian BLS bertujuan untuk menunjukkan bahwa pendengar memahami (*understand*) penyandera.<sup>21</sup> Dengan ditunjukkannya bahwa negosiator memahami penyandera, maka empati pun dapat muncul.

Apabila empati negosiator kepada penyandera berhasil ditunjukkan, maka langkah berikutnya adalah *rapport* atau hubungan baik antara negosiator dan penyandera, yang kemudian mampu mempengaruhi pemikiran dan perilaku penyandera.<sup>22</sup>

**Gambar 2. Behavioral Change Stairway**



Sumber: McCains, M & Mullins, W., 2015: 163

## METODE RISET

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan didukung oleh studi literatur. Teknik wawancara dipilih oleh penelitian karena akan membantu peneliti untuk mendapatkan data yang eksklusif dan tidak dapat diperoleh melalui sumber lain. Wawancara kualitatif dapat dilakukan dengan tatap muka, melalui

telepon atau korespondensi, serta dalam bentuk wawancara kelompok dengan enam hingga delapan peserta di dalam kelompok.<sup>23</sup> Wawancara kualitatif melibatkan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open-ended*) yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan opini dari peserta.<sup>24</sup>

Proses penelitian kualitatif juga dapat ditunjang melalui pengumpulan dokumen kualitatif. Dokumen ini termasuk dokumen publik seperti koran, notulensi rapat, laporan resmi atau dokumen privat seperti jurnal pribadi, surat, dan surat elektronik.<sup>25</sup> Strategi analisis data merupakan tahapan selanjutnya setelah pengumpulan data, dimana penelitian melakukan proses analisa dari data tersebut. Terdapat lima tahapan strategi analisis data menurut Creswell, yaitu:

1. Pengumpulan data;
2. Membaca keseluruhan data;
3. Mendeskripsikan data;
4. Penyajian data;
5. Penarikan kesimpulan dan intepretasi data.<sup>26</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, studi pustaka, dan *internet-based research*. Data kemudian dideskripsikan dengan konsep serta teori yang ada. Data yang telah dideskripsikan kemudian disajikan, disimpulkan, dan diinterpretasi oleh peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Aktor yang Terlibat dalam Pembebasan Sepuluh Sandera Warga Negara Indonesia

Salah satu variabel dari negosiasi konflik adalah sifat dan penyebab dari terjadinya konflik. Sifat dan penyebab konflik kemudian dapat menentukan eskalasi, de-eskalasi, serta negosiasi yang dapat terjadi dalam sebuah konflik. Untuk memahami sifat dan penyebab konflik, diperlukan pemahaman akan karakter ter dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berkaitan dengan peristiwa pembebasan

<sup>20</sup> McCains, M & Mullins, W. *Crisis Negotiations: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections*, New York: Routledge, 163.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Idem., 230-232

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Idem., 237-245

sandera 10 WNI yang menjadi ABK di kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, maka pihak-pihak yang terlibat diantaranya adalah Kelompok Abu Sayyaf, Yayasan Sukma, Indonesia, serta Filipina.

### **Profil Kelompok Abu Sayyaf**

Untuk memahami motif dan tujuan dari Kelompok Abu Sayyaf dalam menyandera 10 WNI, tentu perlu dipahami profil Kelompok Abu Sayyaf secara mendalam. Secara etimologi nama “Abu Sayyaf” memiliki arti pembawa pedang. Nama “Abu Sayyaf” juga dapat memiliki arti ayah dari pedang. Jejak sejarah berdirinya Kelompok Abu Sayyaf memiliki kaitan yang erat dengan pendirinya, Abdurajak Abubakar Janjalani. Abdurajak Janjalani adalah seorang anak tokoh agama di Basilan. Abdurajak Janjalani sempat mengenyam pendidikan di Arab Saudi, dan kembali ke Filipina pada tahun 1984.

Di tahun 1987, Abdurajak Janjalani melakukan perjalanan ke Libya. Selama perjalanannya, Abdurajak Janjalani kemudian turut mengikuti kamp latihan di Afghanistan bersama ratusan militan Moro lainnya untuk bertempur dengan Mujahidin Afghanistan melawan invasi Uni Soviet. Selama menjalani pelatihan militer di Afghanistan, Abdurajak Janjalani dikomandoi oleh Abdur Rab Rasul Sayyaf, seorang panglima militer dari faksi *Ittihad al-Islami*. Dengan terinspirasi Abdurajak Janjalani terhadap Panglima Abdur Rab Rasul Sayyaf, nama Abu Sayyaf pun dipergunakan oleh Abdurajak Janjalani sebagai nama alias. Abdurajak Janjalani diperkirakan merupakan anggota dari jajaran Executive Council of the Islamic International Brigade, yang selanjutnya akan membentuk jaringan internasional Al-Qaeda.<sup>27</sup> Pada tahun 1989, Abdurajak Janjalani kemudian melakukan perekrutan. Banyak dari anggota

yang direkrut merupakan para anggota *Moro National Liberation Front* (MNLF) yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan Nur Misuari.<sup>28</sup> Nur Misuari sendiri sempat membuka kesempatan untuk mengadakan dialog dengan pemerintah Filipina.

Setelah terkumpulnya anggota, Abdurajak Janjalani bersama para anggota pun membentuk Kelompok Abu Sayyaf. Meski telah ada kelompok bersenjata yang serupa Kelompok Abu Sayyaf, seperti MNLF dan Moro Islamic Liberation Front (MILF), Kelompok Abu Sayyaf muncul sebagai alternatif atas dua kelompok di atas. Kelompok Abu Sayyaf sendiri memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam Sunni Salafi yang independen di wilayah Mindanao. Tujuan tersebut terbentuk salah satunya oleh narasi sejarah dari perjuangan bangsa Moro menghadapi opresi oleh penjajahan bangsa Spanyol, Amerika, dan juga pemerintah Filipina.<sup>29</sup> Leluhur bangsa Moro sendiri telah menduduki wilayah Mindanao sebelum abad ke-14. Selain itu Kelompok Abu Sayyaf juga memiliki tujuan untuk mengusir para penduduk Nasrani yang telah bermigrasi ke wilayah Filipina Selatan sejak tahun 1910 setelah adanya dorongan dari pemerintah.<sup>30</sup> Dalam melakukan perekrutan, Kelompok Abu Sayyaf juga memanfaatkan isu kesenjangan ekonomi antara masyarakat Moro dengan masyarakat Filipina pada umumnya. Dampaknya, banyak dari anggota Kelompok Abu Sayyaf merupakan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi sama sekali.<sup>31</sup>

Keberadaan Kelompok Abu Sayyaf kemudian dianggap Al-Qaeda dapat berperan sebagai perpanjangan tangan Al-Qaeda di Asia, khususnya Filipina. Osama bin Laden, yang sempat bertemu dengan Abdurajak Janjalani selama melakukan perjalanannya dulu, kemudian mengutus Muhammad Jamal

<sup>27</sup> Freeman Spogli Institute for International Studies. (6, August 2018). Stanford Center for International Security and Cooperation. Diambil 12 Maret 2020 dari Stanford University: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Ibid.

Khalifa untuk memberikan pendampingan serta pendaan kepada Kelompok Abu Sayyaf.<sup>32</sup> Osama bin Laden juga memberikan pelatihan perakitan bom kepada para anggota Kelompok Abu Sayyaf melalui Ramzi Yousef.

Dengan adanya bantuan pendanaan oleh Osama bin Laden, Kelompok Abu Sayyaf pun dapat mempersenjatai para anggotanya. Hal ini berdampak pada semakin dikenalnya Kelompok Abu Sayyaf oleh masyarakat luas. Namun hubungan Al-Qaeda dengan Kelompok Abu Sayyaf tak selamanya mulus. Komunikasi keduanya terganggu dengan diblokirnya Muhammad Jamal Khalifa oleh pemerintah Filipina.

Situasi semakin buruk bagi Kelompok Abu Sayyaf ketika sang pemimpin, Abdurajak Janjalani, tewas setelah melakukan kontak senjata api dengan pasukan bersenjata Filipina 18 Desember 1998. Pasca kematian Abdurajak Janjalani, Kelompok Abu Sayyaf kemudian terpecah menjadi dua faksi utama, faksi Basilan yang dipimpin oleh Khadaffi Janjalani dan faksi Sulu yang dipimpin oleh Galib Andang yang juga dikenal sebagai Commander Robot.<sup>33</sup> Dengan terputusnya bantuan dari Al-Qaeda serta absennya figur karismatik seperti Abdurajak Janjalani, menyebabkan terganggunya kedisiplinan dari anggota Kelompok Abu Sayyaf.

Dihadapkan dengan permasalahan ini, Kelompok Abu Sayyaf yang sebelumnya melakukan aktivitas terorisme seperti pemboman dan penembakan dengan tujuan memerdekakan bangsa Moro dari Filipina, beralih modus operandi menjadi penyanderaan dengan tujuan mendapatkan uang tebusan (*kidnapping-for-ransom*). Beralihnya motif atau tujuan dari aktivitas Kelompok Abu Sayyaf tersebut terlihat dengan jumlah korban

penyanderaan yang dibunuh kelompok ini dalam tahun 2000 dan 2001, yakni 16 jiwa.

Selanjutnya pada tahun 2002 pemerintah Filipina berhasil membekuk Abu Sabaya dan Commander Robot, dua rival Khadaffi Janjalani di tubuh internal Kelompok Abu Sayyaf. Hal ini justru menyebabkan tersentralisasinya Kelompok Abu Sayyaf di bawah kepemimpinan Khadaffi Janjalani. Di bawah kepemimpinan Khadaffi Janjalani yang tersentralisasi tersebut, Kelompok Abu Sayyaf kembali fokus kepada cita-cita para pendirinya yakni untuk mendirikan negara Islam di Filipina Selatan.

Namun Kelompok Abu Sayyaf kembali mengalami perpecahan setelah terbunuhnya Khadaffi Janjalani di akhir tahun 2006. Terbunuhnya Abu Sulaiman, yang selama ini turut membentuk aliansi antara Kelompok Abu Sayyaf dan Jemaah Islamiyah, semakin membuat kelompok ini timpang. Kedua peristiwa tersebut menyebabkan kembalinya para anggota Kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan *kidnapping-for-ransom*. Di tahun 2010 Kelompok Abu Sayyaf bahkan berhasil memperoleh uang tebusan senilai US\$ 704 ribu setelah melakukan penyanderaan terhadap 10 orang.<sup>34</sup>

Dengan bertransformasinya Kelompok Abu Sayyaf menjadi organisasi yang beroperasi dengan skala kecil dan fokus pada *kidnapping-for-money*, banyak dari ahli tidak lagi memandang Kelompok Abu Sayyaf sebagai sebuah kelompok yang memperjuangkan tercapainya suatu ideologi ataupun sebagai organisasi teroris, melainkan sebagai kelompok kriminal. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan narasumber yang menyatakan bahwa saat ini Kelompok Abu Sayyaf melakukan tindakan kriminal hanya untuk keuntungan ekonomi semata.

Tentu dengan ketidakjelasan status Kelompok Abu Sayyaf turut mempersulit pihak negosiator yang hendak membebaskan sandera. Hingga tahun 2020, Kelompok Abu Sayyaf juga masih kerap melakukan

<sup>32</sup> Fellman, Z. (n.d.). Homeland Security & Counterterrorism Program Transnational Threats Project. Diambil 12 Maret 2020 dari Center for Strategic & International Studies: [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/publication/111128\\_Fellman\\_ASG\\_AQAMCaseStudy5.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/111128_Fellman_ASG_AQAMCaseStudy5.pdf)

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

penyanderaan (*kidnapping-for-money*), meski berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pihak non-formal maupun pihak pemerintah Filipina.<sup>35</sup> Saat ini Kelompok Abu Sayyaf berada di bawah pimpinan beberapa figur, yakni Yasser Igasan alias Kumander Diang, Radulan Sahiron alias Commander Putol, dan Isnilon Totoni Hapilon alias Abu Musab.<sup>36</sup>

### **Profil Yayasan Sukma**

Cikal bakal berdirinya Yayasan Sukma adalah terjadinya bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Selepas terjadinya bencana tsunami di Aceh tersebut, Media Group kemudian melakukan aktivitas kemanusiaan di bawah program “Indonesia Menangis”. Aktivitas kemanusiaan “Indonesia Menangis” tersebut melibatkan partisipasi berbagai pihak individu maupun institusi dari dalam dan luar negeri. Aktivitas kemanusiaan yang diorganisir oleh Media Group ini terbagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama aktivitas yang dilakukan merupakan respon darurat, yang di antaranya berbentuk penyaluran berbagai kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, obat-obatan, alat medis, dan berbagai peralatan evakuasi. Pada fase ini mobilisasi tenaga relawan serta pembentukan pos untuk mencari korban hilang juga dilakukan. Fase pertama dimulai pada tanggal 27 Desember 2004 dan berakhir pada 28 Februari 2005.<sup>37</sup> Sedangkan pada fase kedua aktivitas yang dilakukan merupakan rehabilitasi sektor pendidikan. Pembangunan sekolah di wilayah bencana serta bantuan

kepada sektor kesehatan dilakukan pada fase ini. Sektor pendidikan dianggap sebagai isu dan prioritas utama dalam fase kedua. Sebab, sebagai dampak bencana tsunami di mana banyak diantara korbannya adalah tenaga pengajar, Aceh diperkirakan kehilangan potensi intelektual hingga 35%.<sup>38</sup> Selain itu banyak fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan prioritas pada fase kedua tersebut, serta untuk memudahkan tata kelola dana donasi dalam jangka panjang secara profesional, maka Chairman dari Media Group kemudian memutuskan untuk membentuk Yayasan Sukma. Yayasan Sukma didirikan di Jakarta melalui surat notaris nomor 15 pada tanggal 25 February 2005.<sup>39</sup> Sehingga, semenjak didirikannya Yayasan Sukma fokus kepada aktivitas kemanusiaan, terutama pendidikan. Melalui Yayasan Sukma, para anak korban bencana pun mendapatkan berbagai fasilitas pendidikan, seperti asrama dan tenaga pengajar yang didatangkan dari berbagai tempat. Para siswa yang dibantu oleh Yayasan Sukma juga berprestasi dengan mengikuti kompetisi seni budaya di Tiongkok.

Yayasan Sukma juga terlibat dalam pembebasan sandera Kelompok Abu Sayyaf dengan mengirimkan tim negosiator yang beranggotakan Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, serta Desi Fitriani.<sup>40</sup> Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin merupakan mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh. Kemudian, Ahmad Baedowi merupakan Direktur Pendidikan Sukma. Selanjutnya, Samsu Rizal Panggabean merupakan pengajar di jurusan Hubungan Internasional serta Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada. Sedangkan Desi Fitriani merupakan jurnalis Metro TV. Setidaknya terdapat 30 anak

<sup>35</sup> Yahya, A. N. (2020, March 3). Kompas.com. Diambil March 18, 2020, from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/20325651/abu-sayyaf-minta-tebusan-bebaskan-5-wni-mahfud-segera-lakukan-pembahasan>

<sup>36</sup> Freeman Spogli Institute for International Studies. (6, August 2018). Stanford Center for International Security and Cooperation. Diambil March 12, 2020, from Stanford University: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group>

<sup>37</sup> Yayasan Sukma. (2018). *About Us*. Diambil April 13, 2020, from Yayasan Sukma: <https://yayasan-sukma.org/about-us>

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Dewi, P. R. (2019). The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016. *Andalas Journal of International Studies*, 200.

Mindanao yang bersekolah di Yayasan Sukma sebagai dampak dari keterlibatan Yayasan Sukma pada pembebasan sandera Warga Negara Indonesia oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan tersebut. Berdasarkan wawancara penelitian dengan seorang atase Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao, diketahui bahwa pasca peristiwa terbebasnya 10 sandera WNI pada 1 Mei 2016, Yayasan Sukma memang bekerja sama dengan Atase Kebudayaan KBRI Manila untuk selanjutnya dapat memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berada di Filipina Selatan.

### Negosiasi Pembebasan Sandera

Setelah mendapatkan kabar disanderanya 10 WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf, Indonesia pun menanggapi dengan cepat dan terbuka. Mengingat penyanderaan terjadi di teritori Filipina, maka Indonesia memutuskan untuk tidak melibatkan angkatan bersenjata dan mengandalkan keterlibatan aktor non-negara. Dengan melibatkan aktor non-negara, Indonesia berharap pembebasan sandera dapat dilakukan dengan lebih cepat karena tidak perlu melewati prosedur birokrasi. Yayasan Sukma kemudian mengirimkan tim negosiasi yang selanjutnya menjadi salah satu aktor non-negara yang terlibat dalam pembebasan sandera 10 WNI yang menjadi ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12.

Tim negosiasi Yayasan Sukma diantaranya terdiri dari Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, serta Desi Fitriani. Pada awalnya, tim negosiasi Yayasan Sukma hanya ditugaskan untuk melakukan *mapping* dan *assessment*.<sup>41</sup> Namun seiring berjalannya operasi, tim negosiasi Yayasan Sukma kemudian berhasil mendapatkan akses untuk melakukan komunikasi dengan anggota

Kelompok Abu Sayyaf. Akses tersebut berhasil didapat setelah tim negosiasi Yayasan Sukma turut melibatkan komunitas lokal di Filipina untuk membebaskan sandera. Meski dengan melakukan kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf merupakan hal yang berisiko, tim negosiasi Yayasan Sukma memerlukan *proof of life* dari kesepuluh WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf.

Misi dari tim negosiasi Yayasan Sukma pun meningkat menjadi negosiasi pembebasan sandera. Dalam rangka menghadapi Kelompok Abu Sayyaf, tim negosiasi Yayasan Sukma menekankan pendekatan kemanusiaan. Pada saat kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf dilakukan, tim negosiasi Yayasan Sukma menyertakan unsur kebudayaan dan agama sebagai perwujudan pendekatan kemanusiaan tersebut. Unsur kebudayaan dan agama yang disertakan antara lain adalah kue bakpia, keripik peyek, rokok, serta kitab suci Al-Quran.<sup>42</sup> Detil dari pendekatan kemanusiaan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma sendiri akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Dengan pendekatan kemanusiaan tersebut, tim negosiasi Yayasan Sukma pun berhasil mendapatkan kepercayaan dari Kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan negosiasi.

Pada 1 Mei 2016, kesepuluh sandera kemudian berhasil dibebaskan dengan uang tebusan 5 juta peso, dan kemudian diantarkan ke rumah Gubernur Sulu untuk selanjutnya diterbangkan ke Indonesia.<sup>43</sup> Sebagai langkah preventif, Yayasan Sukma kemudian menjalin kerja sama dengan Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. Sejumlah anak-anak di Filipina Selatan juga diberikan beasiswa pendidikan oleh Yayasan Sukma.

<sup>41</sup> Debora, Yantina, Adhi Bhaskara, Ign L, Indra, Putu Agung Nara. (2016). *Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan*. Diambil November 28, 2019, from tirto.id: <https://tirto.id/terlalu-naif-kalau-tanpa-uang-tebusan-bliy>

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

### **Aktor yang Terlibat dalam Pembebasan Sepuluh Sandera Anak Buah Kapal Warga Negara Indonesia**

Untuk membebaskan 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 menjadi hal yang rumit bagi Indonesia mengingat kesepuluh WNI disandera oleh kelompok kriminal diluar wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak dapat menggunakan kekuatannya militer mengingat apabila Indonesia menggunakan kekuatan militer, Filipina sebagai negara di mana tempat penyanderaan terjadi, akan melihatnya sebagai sebuah agresi Indonesia terhadap kedaulatan Filipina.

Oleh karenanya Indonesia kemudian melibatkan aktor-aktor non-negara yang dapat terjun langsung ke Filipina untuk dapat membebaskan kesepuluh WNI yang disandera. Pelibatan aktor non-negara tersebut dapat dijelaskan dengan konsep *multi-track diplomacy*. Dalam upaya membebaskan sandera 10 ABK WNI kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 Indonesia kemudian melibatkan dua kelompok negosiasi yang masing-masing dibentuk oleh Yayasan Sukma dan Jusuf Kalla. Kelompok negosiasi Yayasan Sukma terdiri dari Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin, Ahmad Baedowi, Samsu Rizal Panggabean, serta Desi Fitriani.<sup>44</sup> Mayor Jenderal Purnawirawan Supriadin merupakan mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda Aceh, Ahmad Baedowi merupakan Direktur Pendidikan Sukma, Samsu Rizal Panggabean merupakan pengajar di jurusan Hubungan Internasional serta Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada, sedangkan Desi Fitriani merupakan jurnalis Metro TV.

Dalam operasinya, kelompok negosiasi Yayasan Sukma melibatkan masyarakat lokal Mindanao dan melakukan koordinasi secara

berkala dengan pihak pemerintah melalui Eddy Mulya sebagai Konselor Menteri Kedutaan Besar Republik Indonesia di Filipina. Pelibatan aktor non-pemerintah oleh Indonesia dalam membebaskan 10 sandera WNI tersebut dapat dilihat menggunakan kacamata *multi-track diplomacy*. Pada track satu *multi-track diplomacy*, yang aktornya adalah pemerintah, Indonesia berupaya melalui Kemenlu serta KBRI Manila dan jajarannya, TNI, pemerintah Filipina beserta kepolisian Filipina dan angkatan bersenjata Filipina. Kelompok yang dibentuk oleh Jusuf Kalla yang beranggotakan Hamid Awaludin, tokoh Palang Merah Indonesia, dapat dikategorikan sebagai track empat *multi-track diplomacy*.

Dalam hal ini, Hamid Awaludin menggunakan relasinya dengan pihak Palang Merah di Filipina untuk mengumpulkan informasi mengenai 10 WNI yang menjadi sandera Kelompok Abu Sayyaf. Sedangkan, kelompok yang dikirim oleh Yayasan Sukma, dapat dikategorikan ke dalam track dua, track lima, track enam, serta track tujuh dalam *multi-track diplomacy*. Luasnya cakupan kelompok negosiasi yang dibentuk oleh Yayasan Sukma disebabkan oleh beragamnya latar belakang dari anggota kelompok negosiasi. Rizal Samsu Panggabean, sebagai pengajar di jurusan Hubungan Internasional serta Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gajah Mada, merupakan anggota kelompok negosiasi Yayasan Sukma yang masuk ke dalam track dua. Aktor dari track dua merupakan ahli konflik resolusi. Selanjutnya, Ahmad Baedowi sebagai Direktur Pendidikan Yayasan Sukma, merupakan perwujudan dari track lima, di mana aktornya adalah institusi pendidikan.

Sedangkan perwujudan dari track enam dan track tujuh oleh tim negosiasi yang dibentuk oleh Yayasan Sukma adalah aktivitas tim Yayasan Sukma guna membebaskan 10 sandera WNI yang menggunakan pendekatan kemanusiaan berupa budaya dan agama.

<sup>44</sup> Dewi, P. R. (2019). The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016. *Andalas Journal of International Studies*, 200.

**Tabel 2. Aktor Multi-track Diplomacy**

Track	Aktor
1	Pemerintah Indonesia, Kemenlu, KBRI Manila, Pemerintah Filipina
2	Tim Negosiator Yayasan Sukma
4	Kelompok Jusuf Kalla
5	Tim Negosiator Yayasan Sukma
6	Tim Negosiator Yayasan Sukma
7	Tim Negosiator Yayasan Sukma

**Sifat dan Penyebab Penyanderaan Sepuluh Warga Negara Indonesia**

Peristiwa penyanderaan 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dapat dipandang sebagai sebuah konflik. Zartmann menyatakan bahwa konflik terjadi ketika terdapat dua atau lebih pihak memiliki perbedaan pandangan dan berusaha memaksakan kehendak mereka.<sup>45</sup> Dalam peristiwa penyanderaan 10 ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, pihak yang terlibat dalam konflik pada awalnya adalah Indonesia dan Kelompok Abu Sayyaf. Indonesia memiliki perbedaan pandangan dengan Kelompok Abu Sayyaf.

Indonesia memandang 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 sebagai warga negara yang wajib dilindungi, sedangkan Kelompok Abu Sayyaf memandang 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 sebagai alat untuk membantu keuangan organisasi.

Dalam peristiwa penyanderaan 10 ABK WNI, sifat dan penyebab dari terjadinya konflik antara Kelompok Abu Sayyaf dengan Indonesia adalah keinginan Kelompok Abu Sayyaf untuk mendapatkan uang tebusan. Uang tebusan diperlukan oleh Kelompok Abu Sayyaf untuk menopang kebutuhan operasi Kelompok Abu Sayyaf. Selain itu, uang tebusan juga digunakan untuk kesejahteraan para anggota kelompok. Oleh karenanya, Kelompok Abu Sayyaf seringkali melakukan

penyanderaan. Namun apabila ditelisik lebih dalam, uang tebusan bukanlah penyebab utama dari dilakukannya penyanderaan oleh Kelompok Abu Sayyaf serta terjadinya konflik antara Kelompok Abu Sayyaf dengan Indonesia.

Kelompok Abu Sayyaf, juga kelompok-kelompok bersenjata di Filipina Selatan lainnya, melakukan operasinya dengan dasar adanya pandangan penduduk Filipina Selatan yang merasa dimarjinalkan oleh pemerintah Filipina. Hal ini terlihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Moro di Filipina Selatan. Selain itu, perbedaan latar belakang seperti budaya dan agama semakin memperkuat semangat Kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan uang tebusan adalah penyebab terjadinya konflik, meski penyebab utamanya bukanlah semata-mata masalah ekonomi. Kelompok Abu Sayyaf memandang keputusan untuk menyandera 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dengan tujuan untuk memanfaatkan momen untuk mendapatkan keuntungan – dalam hal ini uang tebusan – di kemudian hari. Pemanfaatan momen (*seize an advantage*) ini juga bertujuan untuk menutupi kebutuhan biaya operasi Kelompok Abu Sayyaf di masa lalu.

**Tabel 2. Sifat dan Penyebab Aktor Melakukan Konflik**

No.	Aktor	Sifat dan Penyebab Konflik
1.	Kelompok Abu Sayyaf	Perbedaan identitas dan sosio-kultural masyarakat Filipina Selatan dengan masyarakat Filipina
2.	Kelompok Abu Sayyaf	Tindakan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina
3.	Kelompok Abu Sayyaf	Mendapatkan keuntungan ekonomi (uang tebusan)
4.	Indonesia	Melindungi Warga Negara Indonesia

<sup>45</sup> Zartmann, I. & Faure, G. 2005. *Escalation and Negotiation in International Conflicts*. New York: Cambridge University Press, 4

### **Eskalasi Penyanderaan Sepuluh Warga Negara Indonesia**

Keputusan Kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan penyanderaan terhadap 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dapat dipandang sebagai sebuah bentuk eskalasi. Konflik sendiri memiliki struktur yang terbentuk atas eskalasi.<sup>46</sup> Eskalasi dapat diartikan sebagai sebuah peningkatan dalam konflik, sebuah langkah taktis yang berdampak pada sifat konflik itu sendiri. Sedangkan dalam peristiwa penyanderaan sendiri, konflik telah bermula ketika adanya perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Kelompok Abu Sayyaf atas 10 WNI.

Eskalasi dalam konflik dapat berujung pada kesempatan untuk bernegosiasi dalam situasi tertentu.<sup>47</sup> Eskalasi dapat terjadi pada berbagai dimensi dalam konflik. Dalam peristiwa penyanderaan 10 WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12, Kelompok Abu Sayyaf melakukan *escalation of means*, yakni diberikannya tuntutan (*demand*) berupa uang dan sebagai gantinya memberikan penawaran (*offers*) berupa dibebaskannya sandera 10 WNI ABK.

Menanggapi adanya permasalahan ini, pihak lawan Kelompok Abu Sayyaf, yang dalam peristiwa penyanderaan 10 WNI tersebut adalah Indonesia, kemudian memutuskan untuk melibatkan aktor non-formal untuk melakukan pembebasan sandera. Keputusan Indonesia untuk melibatkan pihak lain dalam konsep eskalasi konflik merupakan sebuah *escalation of parties*. Aktor non-formal seperti tim negosiasi yang dibentuk oleh Yayasan Sukma pun, sebagai dampak dari *escalation of parties*, kemudian turut menjadi salah satu pihak (*party*) dalam peristiwa penyanderaan 10 WNI ABK.

Strategi yang dilancarkan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma guna membebaskan sandera adalah pendekatan kemanusiaan melalui pendekatan budaya,

agama, dan pendidikan. Tim negosiasi Yayasan Sukma dalam operasinya juga menjalin hubungan dengan komunitas masyarakat di Filipina. Tujuan tim negosiasi Yayasan Sukma menjalin hubungan dengan komunitas lokal Filipina diantaranya adalah untuk melakukan *assessment* dan *mapping* Kelompok Abu Sayyaf.

Setelah menjalin hubungan dengan komunitas lokal Filipina, tim negosiasi Yayasan Sukma kemudian mendapatkan akses untuk melakukan kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf. Melakukan kontak secara langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf merupakan hal yang penting mengingat tim negosiasi Yayasan Sukma butuh *proof of life* dari 10 sandera WNI. Namun, melakukan kontak langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf juga menjadi hal yang berbahaya.

Dengan dilakukannya kontak langsung oleh tim negosiasi Yayasan Sukma, tim negosiasi Yayasan Sukma secara tidak langsung telah melakukan *escalation of risk*.

**Tabel 3. Eskalasi Konflik oleh Aktor**

No.	Eskalasi Konflik	Peristiwa
1.	Escalation of means	<i>Escalation of means</i> terjadi ketika Kelompok Abu Sayyaf memberikan <i>offer</i> dan <i>demand</i> kepada Indonesia
2.	Escalation of parties	Terjadi ketika Indonesia memutuskan untuk melibatkan aktor non-negara, diantaranya Yayasan Sukma
3.	Escalation of risk	Terjadi ketika tim negosiasi Yayasan Sukma melakukan kontak langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf

<sup>46</sup> Ibid, 6.

<sup>47</sup> Ibid, 5.

### De-eskalasi dan Negosiasi Sepuluh Sandera Warga Negara Indonesia

Dalam peristiwa pembebasan sepuluh sandera WNI, salah satu variabel de-eskalasi terjadi, *changes in parties*, setelah Indonesia memutuskan untuk melibatkan aktor non-negara dalam membebaskan sandera. *Changes in parties* sendiri merupakan situasi dimana eskalasi konflik berubah menjadi situasi negosiasi, yang disebabkan oleh perubahan struktur internal pihak yang terlibat dalam konflik, atau terdapat pihak baru, atau terdapat eliminasi dari pihak yang sudah ada.<sup>48</sup> Dengan adanya *changes in parties*, struktur *decision making* tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia. Variabel de-eskalasi berikutnya terjadi ketika tim negosiator Yayasan Sukma melakukan kontak dengan Kelompok Yayasan Sukma.

Langkah tim negosiator Yayasan Sukma untuk melakukan kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf merupakan langkah yang cukup berisiko. Namun dengan melibatkan komunitas lokal di Filipina Selatan, tim negosiator Yayasan Sukma berhasil mendapatkan akses serta kepercayaan untuk melakukan kontak langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf sekaligus mendapatkan *proof of life* 10 sandera WNI. Setelah tim negosiator Yayasan Sukma berhasil melakukan kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf, komunikasi baik pun berusaha dibangun. Salah satu kunci keberhasilan terbentuknya komunikasi baik antara tim negosiator Yayasan Sukma dengan Kelompok Abu Sayyaf adalah digunakannya pendekatan kemanusiaan oleh tim negosiator Yayasan Sukma.

Menurut salah satu anggota tim negosiator Yayasan Sukma, Rizal Samsu Panggabean, tim negosiator Yayasan Sukma memandang para anggota Kelompok Abu Sayyaf sebagai teman dan manusia yang dapat diajak berbicara.<sup>49</sup> Dengan demikian *active listening*

pun terjadi, dan tim negosiator Yayasan Sukma dapat mengetahui kebutuhan para anggota Kelompok Abu Sayyaf agar negosiasi dapat terus berjalan. Tim negosiator Yayasan Sukma juga turut memberikan berbagai suguhan kepada Kelompok Abu Sayyaf ketika akan melakukan negosiasi. Beberapa suguhan seperti Al Quran, kue bakpia, kripik, dan rokok pun diterima dengan baik oleh para anggota Kelompok Abu Sayyaf. Dengan digunakannya unsur budaya dan agama oleh tim negosiator Yayasan Sukma, variabel *cultural values* dari de-eskalasi konflik pun terpenuhi.

Selain itu, dengan adanya komunikasi baik serta suguhan dengan unsur agama dan budaya tersebut, *empathy* pun terjadi. Ketika *active listening* dan *empathy* berhasil dilakukan, maka *rapport* dapat terwujud. Hal ini terlihat ketika Kelompok Abu Sayyaf menunjukkan *trust* dengan memperlakukan tim negosiator dengan baik dan tanpa kekerasan. Bahkan para anggota Kelompok Abu Sayyaf turut memandang tim negosiator Yayasan Sukma sebagai teman (*brothers*).<sup>50</sup> Maka terjadilah *confidence and security building measure*, di mana transparansi diantara kedua pihak berhasil terwujud dan ketakutan kedua pihak berhasil diredam. Agar komunitas lokal ikut serta untuk terlibat membebaskan 10 sandera WNI, tim negosiator Yayasan Sukma pun memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak di Filipina Selatan. Setelah melakukan negosiasi dengan Yayasan Sukma, sandera pun berhasil dibebaskan dengan uang tebusan lima juta peso, setelah sebelumnya uang tebusan yang dituntut adalah sebesar lima puluh juta peso.<sup>51 52</sup>

---

2019, from tirto.id: <https://tirto.id/terlalu-naif-kalau-tanpa-uang-tebusan-bliy>

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Prasetyo, Wisnu. (2016). *Tentang Uang Tebusan 50 Juta Peso untuk 10 WNI dan Jalur Pelayaran RI-Filipina*. Diambil 28 Januari 2020, dari [detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3201861/tentang-uang-tebusan-50-juta-peso-untuk-10-wni-dan-jalur-pelayaran-ri-filipina](https://news.detik.com/berita/d-3201861/tentang-uang-tebusan-50-juta-peso-untuk-10-wni-dan-jalur-pelayaran-ri-filipina)

---

<sup>48</sup> Idem., 12-13.

<sup>49</sup> Debora, Yantina, Adhi Bhaskara, Ign L, Indra, Putu Agung Nara. (2016). *Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan*. Diambil November 28,

Perubahan jumlah uang tebusan tersebut merupakan indikasi bahwa variabel *changes in attitudes* telah terpenuhi. Zartmann mendefinisikan *changes in attitudes* sebagai sebuah titik dimana eskalasi konflik berhenti sebagai akibat ditunjukkannya kesediaan untuk bernegosiasi oleh salah satu pihak dalam konflik.<sup>53</sup> Perubahan jumlah uang tebusan tersebut menjadi bukti bahwa tim negosiasi telah berhasil melakukan negosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf. Perubahan jumlah uang tebusan tersebut juga menandakan bahwa *influence* dan *behavioral change* telah berhasil dilakukan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma. Keberhasilan negosiasi ditandai dengan dibebaskannya sepuluh sandera WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf yang kemudian diantar ke rumah Gubernur Sulu, Abdusakaur Tan, sebelum akhirnya kesepuluh sandera dibawa ke rumah sakit di Barangay Busbus dan diterbangkan ke Indonesia.<sup>54</sup> Keselamatan kesepuluh WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf tersebut merupakan hal yang luar biasa mengingat sulitnya melakukan komunikasi dengan Kelompok Abu Sayyaf. Kesulitan berkomunikasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya *double payment* atau bahkan *triple payment* atau bahkan terbunuhnya sandera. Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, negosiasi pembebasan 10 sandera WNI masuk ke dalam kategori *resort to a third party*, di mana dalam peristiwa ini Indonesia melibatkan aktor non-negara seperti Yayasan Sukma, yang selanjutnya juga melibatkan komunitas-komunitas lokal di Filipina.

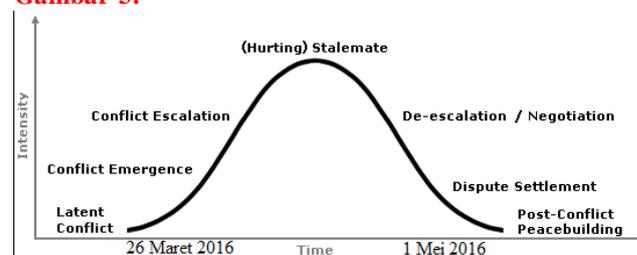
Sedangkan dari sudut pandang tim negosiasi Yayasan Sukma, negosiasi yang dilakukan untuk membebaskan 10 sandera WNI merupakan negosiasi dengan kategori *step back from the action*, di mana tim

negosiasi melihat permasalahan dengan pandangan yang luas, sehingga tim negosiasi tidak memandang Kelompok Abu Sayyaf hanya sebagai teroris dan selanjutnya dapat memasukkan unsur budaya, agama, serta pendidikan guna kelancaran negosiasi. Sebagai langkah preventif, Yayasan Sukma kemudian menjalin kerja sama dengan Atase Kebudayaan KBRI Manila. Sejumlah anak-anak di Filipina Selatan juga diberikan beasiswa pendidikan oleh Yayasan Sukma. Kerja sama dengan Atase Kebudayaan KBRI Manila serta pemberian beasiswa pendidikan tersebut dilakukan setelah tim negosiasi Yayasan Sukma menyadari kondisi serta keinginan masyarakat Filipina Selatan yang tidak memiliki akses pendidikan yang baik.

**Tabel 4. De-eskalasi Konflik**

No.	De-eskalasi Konflik	Peristiwa
1.	<i>Changes in parties</i>	Keterlibatan aktor non-negara
2.	<i>Changes in attitudes</i>	Perubahan sikap Kelompok Abu Sayyaf
3.	<i>Confidence and security building measures</i>	Memudarnya rasa takut dan curiga antar pihak dan munculnya hubungan baru
4.	<i>Learning processes</i>	Adanya persepsi baru yang mengurangi ketidakpastian
5.	<i>Cultural values</i>	Penyertaan unsur kebudayaan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma

**Gambar 3.**



Sumber: Eric Brahm, 2003: 1

Peristiwa pembebasan 10 sandera WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal

<sup>53</sup> Ibid., 12-13.

<sup>54</sup> Wahono, Tri. (2016). *Bebas dari Kelompok Abu Sayyaf, 10 WNI Sempat Dijamu Gubernur Sulu*. Diambil January 28, 2020, from: <https://internasional.kompas.com/read/2016/05/02/00483791/Bebas.dari.Kelompok.Abu.Sayyaf.10.WNI.Sempat.Dijamu.Gubernur.Sulu>.

tongkang Anand 12 dapat digambarkan dengan *life cycle of conflict* sesuai gambar 2.1. Dalam peristiwa pembebasan 10 sandera WNI, *latent conflict* sudah berlangsung sejak lama, yakni ketika masyarakat Filipina Selatan mengalami adanya perbedaan identitas dan ketidakadilan dengan masyarakat Filipina umumnya.

Sedangkan *conflict emergence* terjadi saat sepuluh ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf pada 26 Maret 2016. Selanjutnya, *conflict escalation* terjadi ketika Indonesia melibatkan aktor non-negara dalam usaha membebaskan sandera. Fase *stalemate* terjadi pada 9 April 2016, ketika terjadinya bentrok antara angkatan bersenjata Filipina dengan Kelompok Abu Sayyaf, yang kemudian menewaskan 18 tentara Filipina dan 5 anggota Kelompok Abu Sayyaf.<sup>55</sup>

Kegagalan angkatan bersenjata Filipina dalam menumpas Kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan sandera tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih mengandalkan aktor non-negara dibanding mengandalkan angkatan bersenjata Filipina. Sedangkan dari sisi Kelompok Abu Sayyaf, bentrok tersebut telah melemahkan organisasi. Kelompok Abu Sayyaf perlu mengurangi jumlah sandera untuk meringankan beban. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan narasumber penelitian yang menyatakan bahwa Kelompok Abu Sayyaf seringkali meninggalkan sandernya apabila bentrok dengan angkatan bersenjata terjadi.

Kemudian tim negosiasi Yayasan Sukma pun melakukan kontak dengan Kelompok Abu Sayyaf. Kontak tersebut diikuti dengan adanya unsur-unsur kebudayaan dan agama yang menjadi perwujudan pendekatan kemanusiaan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma. Kepercayaan pun didapat oleh tim negosiasi Yayasan Sukma, dan hal tersebut menandakan de-eskalasi dalam peristiwa pembebasan 10

sandera WNI ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12.

Negosiasi untuk membebaskan sandera kemudian dilakukan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma dan Kelompok Abu Sayyaf. Fase *dispute settlement* tercapai ketika sepuluh sandera ABK kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 dibebaskan di depan rumah Gubernur Sulu, yang selanjutnya diterbangkan ke Indonesia. *Post-conflict peacebuilding* kemudian dilakukan dengan terjalinnya kerja sama antara Yayasan Sukma dengan Atase Kebudayaan KBRI Manila serta adanya pemberian beasiswa oleh Yayasan Sukma kepada anak-anak di Filipina Selatan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada multi-track diplomacy yang dilakukan oleh tim negosiasi Yayasan Sukma. Tim negosiasi Yayasan Sukma kemudian terjun langsung ke Filipina Selatan untuk membebaskan sandera. Pendekatan kemanusiaan serta perlibatan komunitas lokal menjadi kunci bagi tim negosiasi Yayasan Sukma untuk membebaskan sandera. Dengan melibatkan komunitas lokal, tim negosiasi Yayasan Sukma berhasil melakukan kontak langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf. Setelah melakukan kontak langsung dengan Kelompok Abu Sayyaf, tim negosiasi pun berhasil melakukan de-eskalasi konflik dan negosiasi dengan menggunakan unsur kebudayaan, agama, serta pendidikan. Secara historis, Kelompok Abu Sayyaf terbentuk dengan tujuan mendirikan pemerintahan Muslim di Filipina Selatan. Tujuan tersebut lahir dari adanya perbedaan identitas antara masyarakat di Filipina Selatan dengan masyarakat Filipina secara umum. Dengan adanya perbedaan identitas tersebut, masyarakat Filipina Selatan mengalami kekerasan kultural dan struktural yang selanjutnya menyebabkan minimnya akses kesejahteraan masyarakat Filipina Selatan.

Oleh karenanya, menjadi efektif ketika Indonesia dan Yayasan Sukma mengambil langkah pembebasan sandera melalui *multi-*

<sup>55</sup> Indra, Putu Agung Nara. (2016). *Tentara Filipina dan Abu Sayyaf Bentrok*, 23 Tewas. Diambil 28 April 2020 dari: <https://tirto.id/tentara-filipina-dan-abu-sayyaf-bentrok-23-tewas-Drp>

*track diplomacy* yang menitikberatkan pada *peacemaking* dan dengan tujuan *peacebuilding*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arendt, H. (1962). *The Origins of Totalitarianism*. New York: Meridian.
- Asril, S. (2016, May 2). Kompas.com. Diambil dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/05/02/06362411/Negosiator.Sebut.Pembebasan.10.WNI.Tanpa.Uang.Tebusan.Ini.Ceritanya>.
- BBC. (2018, January 9). Philippines' Country Profile. Diambil 9 Mei 2020, dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-15521300>
- Brahm, E (2003, September 1). Conflict Stages. Diambil dari Kompas.com: [https://www.beyondintractability.org/essay/conflict\\_stages](https://www.beyondintractability.org/essay/conflict_stages)
- Burgess, H., & Burgess, G. M. (2016, October 16). Beyond Intractability. Diambil 9 September 2019, dari Beyond Intractability: <https://www.beyondintractability.org/moos/multi-track-diplomacy>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications, Inc.
- Debora, Y., Adhi Bhaskara, I. L., & Indra, P. A. (2016, Juni 17). Terlalu Naif Kalau Tanpa Uang Tebusan. Diambil 28 November 2019, dari tirto.id: <https://tirto.id/terlalu-naif-kalau-tanpa-uang-tebusan-bliy>
- Dewi, P. R. (2019). The Use of Multitrack Diplomacy in The Liberation Of 10 Indonesian Ship Crew From The Abu Sayyaf Group 2016. *Andalas Journal of International Studies*, 188-202.
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. Colorado: Kumarian Press.
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. (n.d.). e-library Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Diambil 18 Mei 2020, dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri: [https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir\\_dok/UU-No.37.1999%20-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf](https://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_dok/UU-No.37.1999%20-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf)
- Faure, G. O. (2003). Negotiating with Terrorists: The Hostage Case. *International Negotiation*, 469-494.
- Faure, G. O. (2011). Negotiating with political, ideological, and criminal terrorists. *Jornadas secuestros y toma de rehenes por parte de grupos terroristas*, 1-28.
- Fellman, Z. (n.d.). Homeland Security & Counterterrorism Program Transnational Threats Project. Diambil 12 Maret 2020, dari Center for Strategic & International Studies: [https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy\\_files/files/publication/111128\\_Fellman\\_ASG\\_AQAMCaseStudy5.pdf](https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/111128_Fellman_ASG_AQAMCaseStudy5.pdf)
- Freeman Spogli Institute for International Studies. (6, August 2018). Stanford Center for International Security and Cooperation. Diambil 12 Maret 2020, dari Stanford University: <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/abu-sayyaf-group>
- Goodin, R. E. (2006). *What's Wrong With Terrorism*. Cambridge: Polity.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave MacMillan.
- Hranjski, H. (2019, January 26). Filipino Muslims Approve New Autonomous Region in Referendum. Diambil 9 Maret 2020, dari AP: <https://apnews.com/b58dbb65b5304bbf9c7b9bceff8d7e6f>
- Indra, P. A. (2016, April 10). Tentara Filipina dan Abu Sayyaf Bentrok, 23 Tewas. Diambil 28 April 2020, dari tirto.id: <https://tirto.id/tentara-filipina-dan-abu-sayyaf-bentrok-23-tewas-Drp>
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi. (2017). *Buku Informasi Statistik 2017*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Teknologi Informasi.
- McCains, M. J., & Mullins, W. C. (2015). *Crisis Negotiations: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections*. New York: Routledge.

- McDonald, J. W. (2003, September 21). Beyond Intractability. Diambil 9 September 2019, dari Beyond Intractability: <https://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>
- McDonald, J. W. (2012). The Institution of Multi-Track Diplomacy. *Journal of Conflictology*, 65-70.
- Prasetyo, W. (2016, May 2). Tentang Uang Tebusan 50 Juta Peso untuk 10 WNI dan Jalur Pelayaran RI-Filipina. Diambil 28 Januari 2020, dari detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-3201861/tentang-uang-tebusan-50-juta-peso-untuk-10-wni-dan-jalur-pelayaran-ri-filipina>
- Wahjudi, G. (2003). Penanganan Aksi Teroisme Internasional di Filipina Bagian Selatan oleh Asean Tahun 2000-2001. *Kerjasama Regional ASEAN Menghadapi Isu Terorisme Internasional*, 85.
- Wahono, T. (2016, May 2). Bebas dari Kelompok Abu Sayyaf, 10 WNI Sempat Dijamu Gubernur Sulu. Diambil 28 Januari 2020, dari Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2016/05/02/00483791/Bebas.dari.Kelompok.Ab.u.Sayyaf.10.WNI.Sempat.Dijamu.Gubernur.Sulu>
- Wibisono, A. N. (2016). Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara. *Ilmu Ushuluddin*, Volume 3, Nomor 1, 119-132.
- Wilson, M. (2011). Toward a Model of Terrorist Behavior in Hostage-Taking Incidents. *The Journal of Conflict Resolution*, 406.
- Yahya, A. N. (2020, March 3). Kompas.com. Diambil 18 Maret 2020, dari Kompas.com: <https://nasionalkompas.com/read/2020/03/03/20325651/abu-sayyaf-minta-tebusan-bebas-5-wni-mahfud-segera-lakukan-pembahasan>
- Yayasan Sukma. (2018). About Us. Diambil 13 April 2020, dari Yayasan Sukma: <https://yayasan-sukma.org/about-us>
- Zartmann, I. W., & Faure, G. O. (2005). *Escalation and Negotiation in International Conflicts*. Cambridge: Cambridge University Press.

## BIOGRAFI

**Joshua**, lahir di Jakarta pada 24 Mei 1998. Memiliki ketertarikan pada *soft-power*, studi perdamaian, studi identitas, dan budaya-budaya dalam Hubungan Internasional

**Hasan Sidik** merupakan pengajar pada Departemen Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran yang memiliki ketertarikan mengkaji hukum Internasional.